



► KASUS IMB APARTEMEN

KPK Selidiki Adanya Arahan Haryadi

JAKARTA—Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tiga saksi dari PT Summarecon Agung terkait dengan kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton.

Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com

KPK memeriksa ketiganya untuk tersangka Haryadi dan kawan-kawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/7) dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Jogja.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan penyidik mengonfirmasi tiga saksi mengenai dugaan adanya arahan tersangka mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti agar dokumen perizinan PT Summarecon Agung Tbk segera diterbitkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja

► Tiga saksi yang diperiksa, yakni Contract Admin PT Summarecon Emiliana serta dua karyawan PT Summarecon Agung masing-masing Heri Marwanto dan Johan Wahyudi.

► Modus utama korupsi di sektor politik yang paling banyak adalah penyalahgunaan jabatan.

“Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya arahan tersangka HS [Haryadi Suyuti] selaku wali kota terkait beberapa dokumen perizinan yang dibuat PT SA Tbk agar bisa segera diterbitkan oleh Pemkot Jogja,” kata Ali Fikri di Jakarta, Selasa (19/7).

Ali Fikri menambahkan tiga saksi yang diperiksa, yakni Contract Admin PT Summarecon Emiliana serta dua karyawan PT Summarecon Agung masing-masing Heri Marwanto dan Johan Wahyudi.

KPK pada Selasa memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Haryadi

dan kawan-kawan, yakni Denny selaku karyawan PT Grahacipta Hadiprana dan karyawan PT Summarecon Agung Ratna Dian Paramitha.

Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief mengatakan modus utama korupsi di sektor politik yang paling banyak adalah penyalahgunaan jabatan.

Menurut dia, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri, kroni, dan kepentingan pemegang kekuasaan yang berada di dalam lingkaran sama. “Kami [KPK] selalu mengingatkan kepada calon politikus serta calon anggota legislatif dan kepala daerah untuk berhati-hati terhadap godaan ini,” kata Amir dalam webinar bertajuk *Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*, Selasa.

Amir menyebutkan penyalahgunaan kekuasaan sering untuk mengeluarkan perizinan atau otorisasi pengadaan barang dan jasa. Dua modus utama korupsi tertinggi lainnya, kata dia, adalah momen elektoral dan momen kebijakan. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005